

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun pelajaran 2013/2014 memberlakukan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan orang Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Menurut pasal 1 ayat (19) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum dapat diartikan sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Kurikulum 2013 mencakup pedoman umum pembelajaran yang terdiri atas kerangka konseptual dan operasional. Kerangka konseptual dan operasional yang dimaksud antara lain strategi pembelajaran, sistem kredit semester, penilaian hasil belajar, dan layanan bimbingan konseling. Strategi pembelajaran digunakan untuk menunjang terwujudnya seluruh kompetensi yang dimuat dalam kurikulum 2013. Strategi penilaian disiapkan untuk memfasilitasi guru dalam mengembangkan pendekatan, teknik, dan instrumen penilaian hasil belajar dengan pendekatan otentik.

Penilaian hasil belajar dapat dilakukan melalui metode tes dan nontes. Metode tes dapat berupa tes tertulis dan tes kinerja. Metode nontes digunakan

untuk menilai sikap, minat, atau motivasi. Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada tiga aspek. Tiga aspek tersebut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual.

Implementasi kurikulum 2013 bukan berarti tanpa masalah. Permasalahan yang timbul antara lain mengenai pelaksanaan penilaian sikap yang harus diterapkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru belum memahami tentang pedoman atau cara menilai, khususnya pada penilaian sikap spiritual yang sesuai dengan kurikulum 2013. Guru sebenarnya telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang implementasi kurikulum 2013, namun di lain pihak guru juga belum memahami cara penilaiannya.

Permasalahan mengenai penilaian sikap juga dipublikasikan oleh beberapa media massa. Contoh kasus secara nyata terdapat di SMP Negeri 8 Pegangsaan Jakarta Pusat, mengenai keluhan para guru tentang penilaian sikap (Kompas, 2014). Guru masih berproses dalam menempuh perubahan sistem penilaian, belum lagi penggunaan piranti teknologi informasi yang banyak dipakai dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Contoh lain juga terjadi di SMA 26 Tebet Jakarta Selatan (Okezone, 2014). Seorang guru memaparkan ada perbedaan mendasar di kurikulum baru yang membuat guru tidak lagi menjadi sumber penentu, tapi lebih

pada mendorong siswa menemukan fakta-faktanya. Lebih lanjut bahwa hal tersebut tidak ada pada metode KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diterapkan sejak tahun 2006 lalu. Melihat kasus-kasus tersebut disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi pada implementasi kurikulum 2013, khususnya dalam pelaksanaan penilaiannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan kajian ilmiah mengenai implementasi pembelajaran dan penilaian sikap spiritual pada kurikulum 2013 dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014. Tema ini dianggap memiliki keterkaitan dengan Progdik PPKn FKIP UMS, karena selaras dengan visi dan misi yang menjadi pedoman. Visi dan misi Progdik PPKn FKIP UMS adalah:

Menjadi pusat perkembangan pendidikan dan pembelajaran bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta ketatanegaraan, untuk membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan ketatanegaraan.
- 2) Memajukan ilmu pengetahuan teknologi, seni serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan menuju masyarakat madani.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui Program Pendidikan Kepramukaan.

Tema penelitian ini juga berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang ada di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS. Mata kuliah tersebut antara lain Evaluasi Pembelajaran PKN-Tn, Teori Pembelajaran, Strategi Pembelajaran PKN-Tn, dan Kajian Kurikulum PKN-Tn.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Peneliti sebelum melakukan penelitian, harus mengetahui permasalahan yang ada. Permasalahan yang telah diketahui secara jelas, akan membuat proses pemecahannya lebih terarah serta tersusun secara sistematis. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014?
2. Bagaimana implementasi aspek penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2010:397), tujuan penelitian adalah “untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan”. Tujuan penelitian berupa jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014.

2. Untuk mendeskripsikan implementasi aspek penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014.

#### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi aspek penilaian sikap spiritual pada kurikulum 2013 dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian berikutnya yang sejenis

##### 2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi guru PPKn di SMA/SMK/MA dalam melaksanakan penilaian spiritual pada siswa di kelas.
- b. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan dalam mengatasi permasalahan dalam penilaian sikap spiritual pada kurikulum 2013 pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA/SMK/MA.

### **E. Daftar Istilah**

Daftar istilah merupakan penjelasan yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi. Menurut Kaber (1988:144), implementasi adalah proses melaksanakan gagasan-gagasan, serangkaian kegiatan baru yang diharapkan dapat membawa perubahan. Pendapat lain menurut Leithwood dan Montgemery (1980) sebagaimana dikutip oleh Kaber (1988:147), implementasi sebagai proses mengurangi kesenjangan antara harapan dan hasil. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah upaya untuk merealisasikan suatu kebijaksanaan pemerintah melalui program-program tertentu guna tercapainya tujuan yang diharapkan.
2. Kurikulum 2013. Menurut Nuh (2013), kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan KBK 2004, tapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan KTSP 2006. Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum lanjutan dari kurikulum KBK 2004 yang sebelumnya telah diterapkan.
3. Pembelajaran. Menurut Fathurrohman dan Sulistyorini (2012:8), pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan membelajarkan siswa yang dinilai dari perubahan perilaku dan meningkatnya pengetahuan dan pengalaman pada diri siswa. Pendapat lain menurut Nasution sebagaimana dikutip Fathurrohman dan Sulistyorini (2012:6), pembelajaran adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pembelajaran adalah suatu kegiatan dalam proses membelajarkan siswa agar mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Daryono (2011:1), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah guna membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perubahan secara optimal dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang menekankan pada pembentukan karakter bangsa dan membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila.
5. Penilaian Sikap. Menurut Azwar (1988:15), penilaian atau pengukuran sikap adalah suatu proses yang rentan terhadap berbagai kemungkinan eror baik eror dalam penyusunan skala, penyajian skala, maupun dalam penafsiran jawaban subjek respondennya. Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa penilaian sikap adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kecenderungan berperilaku atau berbuat sebagai hasil belajar peserta didik.
6. Spiritual. Menurut Doe dan Walch (2001:20), spiritual adalah suatu kesadaran yang menghubungkan seseorang langsung dengan Tuhan, atau apa pun yang dinamakan sebagai sumber keberadaan manusia. Pendapat lain menurut Tim

Penyusun Kamus (1989:857), spiritual juga berarti kejiwaan, rohani, batin, mental, moral. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin).